

B A B I I

NAHDLATUL ULAMA' SEBAGAI PARTAI POLITIK

A. Karakteristik Nahdlatul Ulama' Dan Peranannya.

1. Karakteristik Nahdlatul Ulama'.

Sebagaimana yang telah kami jelaskan pada pene-
gasan judul diatas bahwa Nahdlatul Ulama' adalah suatu
organisasi yang sering disebut jam'iyah bagi umat Is-
lam, didirikan oleh para Ulama' pada tahun 1926 di
Surabaya, dan sejak tahun 1952 sampai tahun 1973 men-
jadi partai politik yang berdasarkan agama Islam de-
ngan berpegang teguh pada salah satu madzhab empat, -
Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali.¹

Apabila ditinjau dari segi bahasa maka Nahdla -
tul Ulama' adalah kata majemuk yang bersal dari bahasa
arab, dari kata Nahdlah artinya kebangkitan, kebangunan
dan kata Ulama' artinya Alim Ulama' atau para kyai .
Kemudian Nahdlatul Ulama'. disingkat dengan NU. Orang
laki-laki disebut Nahdliyin sedang wanitanya disebut
Nahdliyaat.²

Sedangkan dari segi istilahnya Nahdlatul Ulama
adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam

¹Hasan Shadely, Ensiklopedi Indonesia, Ihtiar Baru
Van Hoev, Jakarta, 1983, hal. 2327.

²Ke-NU-AN Buku Pertama, Pengurus Ma'arif Wil, Yog -
yakarta, T. t., hal. 2

bidang agama dan partai politik / organisasi politik beranggutakan perorangan,³ dengan tujuan untuk membangun para kyai yang tidur, serta untuk mewedahi bentuk-bentuk ikatan sosial keagamaan tradisional yang berpusat disekitar pasantren dalam setruktur partai-politik yang moderen dengan perubahan sedikit saja bentuknya.⁴

Nahdlatul Ulama' merupakan sebuah organisasi - Ulama', karna itu wajar manakala mempunyai citra baku tersendiri, dimana ciri diniyahnya menonjol. hal ini bisa kita amati dari segi internal NU itu sendiri. Pertama, NU didirikan karna motif keagamaan bukan karna dorongan politik, ekonomi dan budaya. Kedua, NU bersendikan agama, segala sikap tingkah laku serta karakteristik perjuangannya selalu disesuaikan dan diatur dengan norma-norma agama. Ketiga, Semua perjuangannya NU hanyalah demi untuk Izzul Islam Wal Mu'minin, menuju rahmatan lil alamiin. Dan Keempat, NU menitik beratkan kegiatannya pada bidang-bidang yang langsung berhubungan dengan keagamaan dan kemasyarakatan, misalnya masalah Ubudiyah, Mabarrah, Da'wah, Mu'amalah antar sesama manusia demi tetap tegaknya kalimatullah-

³Fatwah Ulama' Wajib Sukseskan Pemilu Tidak Wajib Nyoblos PPP, Bumi Jaya, 1987, hal. 6.

⁴Clifford Greertz, Abangan Santri Priyayi Dalam Masyarakat Jawa, Pustaka Jaya, 1981, hal. 239.

hiyal ulya.⁵

Apabila kita membaca lembaran sejarah maka kita akan tahu bahwa sejak didirikannya, Nahdlatul Ulama' menjelaskan bahwa dirinya sebagai organisasi keagamaan jam'iyah Islamiyah dengan tujuan untuk meningkatkan - hidup dan kehidupan dengan ajaran Islam serta mengem - bangkannya, sehingga terwujudlah peranan agama Islam - dan para pemeluknya sebagai rahmatan lil alamin rahmat bagi seluruh alam semesta ini.

Sebagai organisasi, Nahdlatul Ulama' memiliki wawasan keagamaan tersendiri, yaitu cara Nahdlatul Ulama' memandang agama, memahami, menghayati dan mengamalkan, cara bersikap menempatkan diri sebagai pemeluk agama dengan memahami bahwa :

- a. Agama sebagai ajaran (wahyu) Allah yang maha luhur, harus ditempatkan pada kedudukan paling luhur dan dipelihara keluhurannya. Dengan mengamalkan apa yang sesuai dengan keridlahan Allah.
- b. Agama Islam sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT. Kepada Nabi Muhammad Saw. Rasul terbesar dan terahir harus difahami, dihayati dan diamalkan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan kepada kita.

⁵Dokumentasi Kliping Munas Ulama' Dan Masadepan NU Serial (2), Lembaga Study Dan Pengabdian Masyarakat (LSPM), 1984, hal. 13.

- c. Al Qur'an dan As Sunnah sebagai sumber dari segala sumber hukum, sumber ajaran Islam, harus dipelajari difahami, melalui jalur-jalur yang dapat dipertanggung jawabkan kemurniannya. Yaitu para hulafa'ur - Rasyidin dan generasi sesudahnya.
- d. Qur'an dan Sunnah yang sangat luhur dan disampaikan dengan berangsur-angsur meskipun mengena'i sesuatu ma salah, sistimatikanya tidak seperti sistimatikanya buku pelajaran sekolah.
- e. Bagi yang tidak punya kemampuan syarat dan sarana - nya tersedia satu-satunya cara memahami dan menga - malkan ajaran Al Qu'an dan As Sunnah yaitu dengan mengikuti pendapat hasil daya fikir tokoh-tokoh - agama yang dapat dipertanggung jawabkan kemampuannya⁶.

Demikianlah karakterNU dalam memahami wawasan keagamaan yang dituangkan dalam tingkah laku hidup sehari-hari sesuai dengan Al Qur'an dan As Sunnah, hal ini sesuai dengan wawasan faham Ahlussunnah Wal jamaah sehingga tidak asing lagi kalau NU sejak lahir sudah mengatakan dirinya sepagai penegak panji Ahlussunnah Wal jama'ah dan mengamalkan ajaran Islam yang murni sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. Ber sama para sahabatnya.

⁶Ahmad Sidiq, Khittah Nahdliyah, Balai Buku Surabaya , 1979, hal. 10.

Berdasarkan wawasan faham keagamaan NU diatas Einar Martahan Sitopul mengutip hasil keputusan Mukta-mar NU XXVII tentang dasar-dasar faham keagamaan Nah - dlatul Ulama' sebagai berikut :

- a. Nahdlatul Ulama' mendasarkan faham keagamaan kepada ajaran Islam Al Qur'an, As Sunnah, Al Ijma' dan Al-Qiyas.
- b. Dalam memahami menafsirkan Islam dari sumber-sumber nya tersebut diatas, Nahdlatul Ulama' mengikuti faham Ahlussunnah Wal Jama'ah dengan menggunakan - jalan pendekatan al madzhab yang secara eksplisit dijelaskan oleh kyai haji Bisri Musthafa, bahwa - faham Ahlussunnah Wal jama'ah adalah suatu faham yang berpegang teguh pada tradisi sebagai berikut :
 1. Bidang Aqidah Nahdlatul Ulama' mengikuti faham Ahlussunnah yang dipelopori oleh Imam Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Musa Al Maturidi, yang pada pokoknya mempunyai tiga karakter diantaranya :
 - 1.1. Keseimbangan antara dalil naqli dan dalil aq - li (Al Qur'an dan As Sunnah) dengan pengerti-an dalil aqli ditempatkan dibawah dalil Naqli.
 - 1.2. Berusaha sekuat tenaga memurnikan aqidah dari segala macam aqidah diluar Islam.
 - 1.3. Tidak mudah menjatuhkan fonis musyrik, kafir dan sebagainya atas seseorang yang karna satu sama lain belum dapat memurnikan aqidah semur-

ni-murninya.⁷

2. Bidang fegih mengikuti jalan pendekatan almadhab salah satu dari empat madzhab, yakni Abu Hanifah AnnU'man; Jmam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Asyafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal.
3. Bidang tasawuf mengikuti antara lain Imam Alju - naidi Al Buhdadi dan Imam Al Ghazali serta Imam-Imam yang lain.⁸

c. Nahdlatul Ulama' mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama yang fitri. Yang menyempurnakan segala kebaikan yang dimiliki oleh manusia. Faham keagamaan yang dianut oleh NU bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.⁹

Dari nilai-nilai dasar keagamaan tersebut Nahdlatul Ulama' mengalih sikap wawasan kemasyarakatan yang bercirikan pada :

a. Sikap tawassut dan i'tidal

Sikap tengah yang berintikan pada prinsip hidup yang menjunjung tinggi keharusan berlaku adil dan

⁷ Ahmad siddiq, Op. Cit., hal. 41.

⁸ Zamahsyari Dhafir, Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, LP3ES, Cet, I, 1982, hal. 149

⁹ Einar Martahan Sitompol Mth, NU Dan Pancasila, Sh Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hal. 214-215.

lurus ditengah-tengah kehidupan masyarakat bersama. Dengan sikap dasar ini NU bertindak lurus dan ber-sikap membangun serta menghindari segala bentuk - pendekatan yang bersifat tatharruf (ekstrim).

b. Sikap tasammuh

Sikap toleran terhadap perbedaan pandangan baik - dalam masalah keagamaan, terutama hal-hal yang ber-sifat furu' atau menjadi masalah hilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.

c. Sikap tawazzun

Sikap seimbang dalam berhidmah, menyerasikan hidmah kepada Allah Swt. Hidmah kepada sesama manusia serta kepada lingkungan hidupnya. menyelaraskan kepentingan hidupnya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu masa kini dan masa **mehdatang**.

d. Amar ma'ruf nahi mungkar

Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai - nilai kehidupan.¹⁰

Dasar-dasar keagamaan dan konsep kemasyarakatan tersebut diatas akan membentuk prilaku warga Nahdlatul Ulama' baik dalam tingkah laku perorangan maupun orga-

¹⁰I b i d, h a l. 217.

nisasi yang akan membuahkkan fikiran :

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai maupun norma - norma ajaran Islam.
- b. Mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi.
- c. Menjunjung tinggi persaudaraan serta saling kasih mengkasih.
- d. Menjunjung tinggi sifat keihlasan dan berhidmah serta berjuang.
- e. Meluhurkan kemulyaan moral (ahlak al karimah) dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berfikir bersikap dan bertindak.
- f. Menjunjung kesetiaan kepada agama bangsa dan negara.
- g. Menjunjung tinggi Ilmu pengetahuan.
- h. Selalu siap untuk menyelesaikan dari setiap perubahan yang membawa manfaat bagi perkembangan masyarakat.
- i. Menjunjung tinggi kebersamaan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.¹¹

Sebagai karakter Nahdlatul Ulama' sejak awal berdirinya sudah dasar pedoman yang peka terhadap pentingnya terus menerus dibina hubungan dan komunikasi antara para kyai sebagai pimpinan masyarakat serta adanya keprihatinan, kebodohan dan kemiskinan.

¹¹I b i d, h a l . . 217-218.

Disamping itu Nahdlatul Ulama' meyakini bahwa persatuan dan kesatuan para Ulama' dan para pengikutnya - masalah pendidikan dakwah Islamiyah, kegiatan sosial serta perekonomian adalah masalah yang terbelakang, bodoh, miskin, menjadi yang maju sejahtera dan berahlak mulia. sehingga dapat berparti sipasi terhadap setiap usaha yang bertujuan membawa masyarakat kepada kehidupan yang maslahat serta mewujudkan amal ibadah yang didasarkan pada faham kemasyarakatan yang dianutnya.¹²

2. Peranan Nahdlatul Ulama'

Sebagaimana yang telah kami singgung diatas bahwa jam'iyah Nahdlatul Ulama' yang didirikan oleh para Ulama' pada sebelumnya sudah mempunyai kesamaan - kesamaan dalam wawasan keagamaan yang meliputi sikap dan tatacara pemahaman, penghayatannya, pengamalan ajaran agama Islam, bahkan pada sampai pada tingkah laku sehari-hari.

Kesamaan yang sudah membudaya dan menjadi perwatakan (karakteristik) itu dibawah dan dituangkan dalam Nahdlatul Ulama' sebagai wadah perjuangan bersama itulah yang ingin dirumuskan menjadi khittah Nahdlyah, garis-garis besar pandangan tingkah laku perjuangan Nahdlatul

¹²Achmad Siddiq, Op, Cit., hal. 3.

Ulama',¹³ sekaligus merupakan wadah bagi para Ulama' dan pengikut-pengikutnya yang didirikan pada 16 Rojab 1344 H. / 13 Januari 1926 M. Dengan tujuan untuk memelihara, melestarikan dan mengembangkan, serta mengamalkan ajaran agama Islam yang berhaluan Ahlussunnah Wal jama'ah,¹⁴ dan menganut madzhab empat masing-masing Imam Abu Hanifah An Nu'man, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris As Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, serta untuk mempersarukan langkah-langkah para Ulama' dan para pengikutnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat dan martabat manusia.

Dengan demikian NU merupakan gerakan keagamaan - bertujuan untuk membangun, mengembangkan insan dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah Swt. Cerdas, terampil, - berahlak mulia, adil dan sejahtera.

Nahdlatul Ulama' mewujudkan cita-cita dan tujuannya melalui serangkaian kegiatan yang dilandasi dengan dasar-dasar faham keagamaan yang membentuk kepribadian khas

¹³Yaitu golongan yang berpegang pada sunnah percaya dan menerima hadis-hadis shahih tanpa memilih dan in - prestasi. Dan jama'ah berrati mayoritas (umumnya umat is - lam) jumlahnya amat besar dalam halayak ramai sebagai lawan Mu'tazilah yang bersifat minoritas dan takkuat berpegang pada Sunnah. Lihat Harun Nasution, Teologi Islam, Teologi Islam Aliran Sejarah Perbandingan, Uni Porsitas Indonesia, 1986, hal. 64.

¹⁴Hittah Nahdlatul Ulama', Lajnah Ta'lif Wan Nasya B, Pengurus Nahdlatul Ulama', Surabaya, t, t., hal. 6.

Ahdlatul Ulama' sebagaimana yang terdapat dalam khittah - Nahdlatul Ulama',¹⁵ serta menyadari pula bahwa perkembangan hubungan antar bangsa, sesama manusia menuntut saling perdamaian, maka NU mengembangkan uhuwah Islamiah demi kepentingan Nasional, yakni agama, nusa dan bangsa,¹⁶ sebagaimana yang telah dikatakan oleh K. H. Hasyim Asy'ari dalam kongres Nahdlatul Ulama' di Banjarmasin Kalimantan Selatan, Ia mengeluarkan sebuah pernyataan yang menyeru-- pada semua Ulama' peserta kongres untuk mengesampingkan semua pertikaian, membuang perasaan ta'asub fanatik dalam berpendapat. Melupakan segala cacian dan celaan terhadap sesama serta menegakkan persatuan dan kesatuan diantara - sesama umat Islam.

Beliau mendesak para peserta untuk mempertahankan Al Qur'an dan Allah serta menolak yang salah. Ia menekankan agar seseorang hanya teguh tegak dalam hal-hal yang prinsipil saja, tugas utama manusia ialah untuk memeluk Islam.¹⁷ Dan warga NU harus tetap mempunyai sikap tasam - muh, lapang dada ditengah-tengah kemungkinan perbedaan dalam masalah keagamaan dan kemasyarakatan dengan tanpa

¹⁵I b i d, H a l . 4.

¹⁶Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga, Lajnah Ta'lif Wan Nasyar, PB NU Jakarta t, t., hal. 3-4.

¹⁷Deliar Noer, Gerakan Moderen Islam Di Indonesia-1900-1945, LP3ES, Hal. 62

tanpa meninggalkan prinsip. Tasamuh merupakan sikap dasar untuk mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa yang diinginkan oleh NU.

Rasa tasamuh yang membudaya dalam masyarakat akan menjadi penangkal bagi setiap bentuk ekstrimitas dan mampu menumbuhkan kesetia kawan, sikap saling menghormati-¹⁸ kejujuran dan ketulusan untuk bersama-sama membina bangsa.

Sebab NU merupakan Nahdliyah atau gerakan para Ulama' untuk melenyapkan segala bentuk penjajahan yang melanda bangsa dan tanah air Indonesia,¹⁹ serta berjihad dalam arti melakukan pengerahan total segenap dana dan daya untuk merealisasikan cita-cita pembaharuan,²⁰ demi menghapus kezaliman di Bumi Indonesia yang dilakukan oleh penjajah.

Mereka harus ditumpas dan dimusnahkan tidak boleh berkeliaran di Bumi Indonesiakarna mereka telah merusak hak-hak warga pribumi. Mereka memusuhi dakwah Islam menghalangi dengan berbagai macam rintangan, mengadu, menipu, menghianati dan melanggar perjanjian-perjanjian yang telah diputuskan bersama bahkan mereka sangat kejam mengangkat senjata, memerangi, membunuh orang-orang yang ber-

¹⁸Hasil-Hasil Muktamar NU Ke 28 Di Pondok Pesantren Al Munawir Krapyak Yogyakarta, Al Alawiyah, 1990, hal. 179.

¹⁹Ke-NU-An Buku Pertama, Op. Cit., hal. 7.

²⁰M. Nurhalis Majid, Cakrawala Islam Antara Cita Dan Fakta, Mizan, Bandung, 1987, hal. 32.

iman yang selalu mengikuti jalan Allah sedang mereka tidak bersalah.²¹ Bukankah Allah telah menyuruh memerangi kaum yang dzalim? hal ini tertera dalam Surat An Nisa' ayat 75:

وهالكم لا تتأثلون في سبيل الله والمسلمين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا .

"Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah - dan orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdo'a: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang dzalim - penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!". - (Qosos 4 : 75)²²

Ayat ini bertumpu pada dua nilai kerohanian untuk menggerakkan jihad. Nilai yang kedua adalah rasa tanggung jawab untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak berdaya dari cengkraman para penindas.²³ Bahkan ayat diatas diper - tegas lagi dalam surat Al Haj 39-41.

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا انه يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومسجد يذ فيها اسم الله كثيرا ولينصرون ان الله عن ينصرة ان الله لقي عزيز الذين انه مكنهم في الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله بما تعملون اعلم

²¹ Abd. Hadi Asyal, Islam Membawa Masyarakat adil Makmur, Pustaka Dian, Jakarta, 1987. hal. 361.

²² Al Qur'an dan Terjemahannya, hal. 179.

²³ Murtadla Muhahari, Masyarakat dan Sejarah Kritik-Islam Atas Marxisme dan Teori Lahirnya, Mizan Bandung, cet Pertama, 1986, hal. 196.

"Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang dianiaya dan sungguh Allah mampu memberi mereka kemenangan yang diusir dari kampung halaman mereka secara dzalim karna mereka berkata : Tuhan kami adalah sekiranya Allah tidak menolak sebagian manusia melalui sebagian yang lain tentulah biara-biara, gereja-gereja dan Masjid-masjid yang didalamnya banyak disebut nama-nama Allah. Sungguh Allah menolong orang-orang yang menolongnya. Sungguh Allah maha kuat lagi maha kuasa yang jika kami tegakkan mereka dibumi, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuru berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar dan milik Allah segala urusan. (Qosos : 39-41).²⁴

Dari sini bisa disimak bahwa izin jihad dan membe-la diri dimulai dengan merujuk ke hak-hak mereka yang diinginkan untuk berperang. Tetapi pada saat yang sama falsafah yang mendasari pembelaan dipandang sebagai sesuatu yang lebih mendasar dari pada kedzaliman yang dilakukan oleh kaum tertentu. Falsafah pembelaan adalah apabila kaum beriman tidak bertindak dan tidak bangkit melawan orang-orang kafir, maka masjid-masjid dan tempat-tempat ibadah yang lain yang merupakan jantung kehidupan rohani suatu masyarakat akan porak poranda dan tercampakkan.

Bahkan menurut Al Qur'an dan As Sunnah sungguh kejam jahat penindasan dan kedzaliman, sedang melindungi dan membela hak-hak dipandang sebagai kewajiban. Namun pada saat yang sama semua hak dan kewajiban semacam itu pada dasarnya dikemukakan karna hal itu menggambarkan serangkaian nilai-nilai kemulyaan manusia.²⁵

²⁴ Al Qur'an Dan Terjemahannya, Op, Cit., hal. 519.

²⁵ Murtadla Muthaha, Op, Cit., hal. 187-189.

Dari sinilah NU lahir mendorong jiwa semangat nasionalisme sebab membangun Nasionalisme pada saat itu sama artinya dengan membela tanah air, dan membela tanah air berarti juga membelatuntutan rakyat untuk merdeka.²⁶ Demikianlah NU memberikan doktrinnya kepada umat Islam agar supaya umat Islam tetap teguh dalam memperjuangkan agama nad Negara.

Dengan dalih membela agama dan negara inilah NU menghalalkan darah dan harta kaum penjajah, karna penjajah itu taklain dari orang yang telah melanggar batas negeri. Oleh karnahnya segala darah dan harta kaum penjajah yang ditumpahkan oleh kaum muslimin adalah darah halal dan segala harta yang mereka sita adalah harta halal.

Islam mengharamkan kaum muslimin menjunjung dan mencintai kaum penjajah tapi mewajibkan agar semua kaum-muslimin mengutuk, membenci serta memerangnya.²⁷ Dan sebagai aplikasinya dari garis diatas, Ulama'-Ulama' NU dan para santrinya segera bangkit bersemangat, kerja dengan giat melawan penjajah demi untuk mengantarkan bangsa Indonesia menuju pintu kemerdekaan.

Demikianlah kyai-kyai dan para santri mereka beke-

²⁶Chairul Anam, Perkembangan Dan Pertumbuhan Nah - dlatul Ulama', Jatayu, Sala, 1985, hal. 33.

²⁷Abdul Kadir Audah, Islam Dan Perundang-Undangan, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hal. 165

kerja penuh dengan semangat juang yang menggelora karna fase itu NU benar-benar dalam keadaan yang sangat terjepit. Indonesia dalam keadaan suran karna pecahnya perang pasifik pada saat itu dan juga Jepang yang menggantikan kedudukan di Indonesia.

Kedatangan Jepang pada tanggal 12 September 1940 dibawah pimpinan Kaboyasyi di Jakarta memberikan kesempatan kepada beberapa tokoh bangsa Indonesia untuk membicarakan masalah politik dan ekonomi. Mereka berpidato dengan keras dan menunjukkan sikap ketidakpercayaan terhadap Belanda untuk menguasai situasi politik dan kesejajaran pikiran mereka dengan kaum Nasionalis diluar volkstata kaum intlek tual.²⁸

Setelah Jepang dapat mengalahkan Belanda dan berkuasa di Indonesia, Jepang mempunyai semboyan politik Asia Timur Raya. Semboyan ini cukup merangsang bangsa Indonesia sehingga rakyat cukup antusias terhadap Jepang dan membenci pada Belanda semakin memuncak.

Kedatangan Jepang 7 Maret 1942 itu disambut dengan baik oleh bangsa kita,²⁹ karna dianggap dapat memberikan kelonggaran dalam mengurus masalah-masalah keagamaan,

²⁸ Sartono Karto Dirjo Dkk, Sejarah Nasional Indonesia, Jilid V, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1975, hal. 317.

²⁹ Chalid Mawardi, Pratica Politika Nahdlatul Ulama, Yayasan Pendidikan Pratika, Jakarta, t. t., hal. 22.

disamping itu memang sejak kedatangannya di Jawa pemerintah Jepang itu berulang-ulang menyampaikan maksudnya untuk menghormati, menghargai dan melindungi Islam.³⁰ Tetapi semua itu hampa belaka karena setelah Jepang dapat menguasai Batavia Kolonel Heroi berpidato menyampaikan bahwa dirinya telah diangkat pemerintah menjadi kepala kantor urusan agama (Sumubu).³¹

Kolonel Heroi menjelaskan bahwa ia akan segera menjalankan tugasnya mengurangi tempat-tempat Ibadah dan Sumubu berada dalam kekuasaannya. Karena itu harus menuruti perintah militer Jepang. Sejalan dengan itu Jendral Imamura panglima pertama di Indonesia pada awal pendudukan Jepang mengeluarkan Dekritnya yang isinya melarang semua aktifitas politik Bangsa Indonesia dalam bentuk apapun. Semua kegiatan dilarang, boleh melaksanakan dengan syarat minta izin lebih dulu. Larangan semacam ini sama halnya dengan membunuh aktifitas organisasi sosial keagamaan maupun politik di Indonesia.³²

Tindakan tersebut dilakukan Jepang dengan dalih negara dalam keadaan darurat perang, suasana sangat geram pertempuran terjadi di kota-kota besar yang penting misalnya Semarang, Surabaya, Balikpapan, Tarakan, Makasar dan

³⁰ Harry J. Benda, Bulan Stabit Matahari Terbit, - Islam di Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang, Pustaka - Jaya, Jakarta, Cet. I, 1980, hal. 153.

³¹ Chairul Anam, Op. Cit., hal. 113

³² Ibid, hal. 113.

lainnya. Kota-kota besar ini menjadi medan pertempuran antara tentara Jepang dengan tentara Sekutu.

Dengan alasan situasi yang sangat genting inilah Jepang membubarkan semua organisasi-organisasi kemasyarakatan atau organisasi sosial politik keagamaan, kendatipun semua aktifitas kegiatan harus memusatkan perhatiannya kepada perang melawan Sekutu.³³

Selama penjajahan Jepang ini NU mempunyai jasa dan andil yang sangat besar. NU bekerja sama dengan Jepang untuk menentang dan mengusir penjajah, tapi dalam hal-hal yang prinsipil NU tetap tidak mau kerja sama dengan Jepang bahkan NU selalu menentang dan memusuhinya misalnya :

- a. NU menentang kewajiban Saikere yang ditetapkan oleh Jepang. Yaitu ucapan penyembahan kepada istanah Tenno Haika di Negara Jepang dengan posisi membungkukkan badan 90 derajat menghadap kearah Tokyo. Perintah ini diharuskan untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali dari golongan manapun. Perintah itu ditolak oleh KH. Hasyim Asy'ari dengan menyerukan kepada seluruh ummat Islam hususnya warga NU jangan sampai menjalankan sebab itu hukumnya haram.³⁴ KH. Hasyim

33

Chalid Mawardi, Loc. Cit., hal. 22.

34

Chairul Anam, Op. Cit., hal. 114.

Asy'ari dan KH. Mahfud Siddiq ditahan dalam penjara.³⁵

Peristiwa itu cukup menggemparkan dalam dunia pesantren dikalangan NU sehingga dicari bentuk penyelesaiannya. Pada tanggal 1 Agustus 1942 para konsul NU mengadakan pertemuan di Jakarta membahas tentang pembelaan terhadap kedua pimpinan NU yang disekap Jepang.

Peristiwa berkumpulnya konsul-konsul itu jelas merupakan tamparan bagi Jepang karena NU tidak mau kehilangan semangat walaupun kedua tokohnya ditangkap. Bahkan Jepang mulai kehilangan simpati dari kalangan umat Islam. Akhirnya perlawanan umat Islam terhadap Saikere terjadi dengan keras diseluruh tanah air kemudian budaya sinto dihapus dan Jepang mau memperbaiki lagi hubungann dengan umat Islam.³⁶

Pada tanggal 17 Desember 1942 Panglima Tertinggi angkatan bersenjata Jepang dibawa Saiko Sikikan mengundang 32 Ulama' Jawa dan Madura termasuk KH. Hasyim Asy'ari, KH. Mahfud Siddiq dan KH. Wahid Hasyim dalam resepsi penghormatan Jepang kepada para Ulama' bertempat di Batavia. Ini berarti Jepang telah mengakui harisma Ulama' Indonesia tidak bisa diremehkan. Dan pertemuan semacam itu belum pernah ditemui di jaman penjajahan Belanda.³⁷

³⁵Ke-NU-AN, Buku Pertama, Op. Cit., hal. 114.

³⁶Chairul Anam, Op. Cit., hal. 114.

³⁷Ibid., hal. 116.

b. Membentuk barisan kemiliteran yang terdiri dari :

1. Barisan Hisbullah yaitu barisan yang anggotanya hampir semua terdiri dari pemuda Ansor. Panglima tertinggi dipegang oleh K.H. Zainal Arifin (konsul-NU Jakarta).
2. Barisan Sabilillah yaitu barisan yang dipimpin oleh panglima tertinggi K. H. Masykur (konsul NU Malang)
3. Barisan Kyai atau Mujahidin dipimpin panglima tertinggi K. H. Wahab Hasbullah (tokoh pendiri NU). -
Dari ketiga angkatan bersenjata inilah yang dipakai oleh NU dalam mengusir Penjajah.

Setelah Jepang kalah tentara Nika hendak mencoba kembali mengganti kedudukan Jepang..NU segera mengambil konsul-konsulnya se Jawa dan Madura untuk menentukan sikap terhadap Nika. Pertama di kantor PB NU Bubutan 6/2-Surabaya pada tanggal 21-22 Oktober 1945 dipimpin langsung oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan berhasil mengeluarkan keputusan Resolosi Jihad yang sangat penting bagi sejarah revolusi 1945.³⁸ Resolosi Jihad itu berbunyi :

1. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 wajib dipertahankan.
2. Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah wajib dibela dan diselamatkan.
3. Musuh Republik Indonesia, terutama Belanda yang datang

³⁸Ibid, hal. 124

kemudian membonceng tugas-tugas tentara sekutu (Inggris) dalam tawanan perang Jepang tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia.

4. Umat Islam terutama NU wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia.
5. Kuajiban jihad tersebut menjadi suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam (fardu ain) yang berada dalam jarak radius 94 km jarak dimana umat Islam diperkenankan shalat jama' dan qashar. Adapun mereka yang berada diluar jatak tersebut berkuajiban membantu saudara-saudara yang berada dalam jarak radius tertentu.³⁹

Dengan Resolusi jihad itu umat Islam mempunyai pedoman dalam perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dalam membela tanah air.⁴⁰

Resolusi jihad tersebut membakar hati umat Islam dalam perang kemerdekaan dan revolusi mempertahankan negara Republik Indonesia ini.⁴¹ Kemudian Resolusi jihad itu dipertegas Mu'tamar Islam Indonesia Yogyakarta 7-08

³⁹ Selamat Evendi Yusuf Dkk, Dinamika kaum santri, - CV Rajawali, Jakarta, t, t, hal. 38

⁴⁰ Kebangkitan Umat Islam Dan Peranan NU Di Indonesia Menyambut Abad XV H, Diselenggarakan Oleh NU Cabang - Kota Madya Surabaya, 26 Dan 31, 1980, hal. 131.

⁴¹ Saifuddin Zuhri, Unsur Bolitik Dalam Dakwah, PT Al Ma'arif, Cet, Pertama, 1982, hal. 30.

November 1945. Mukhtamar bersejarah bagi lahirnya partai - Mas'umi, ini juga mengeluarkan resolusi perang sabil melawan Imperialis, bahwa tiap-tiap bentuk penjajahan adalah suatu kezaliman dan haram menurut Islam karena itu wajib bagi setiap muslim berjuang dengan jiwa raganya membasmi - Imperialis demi kemerdekaan agama dan Negara.⁴²

Pada tanggal 27 Oktober 1945 tentara Inggris mulai menduduki gedung-gedung pemerintahan kita yang dipertahankan oleh pemuda-pemuda Indonesia. Terjadilah pertempuran sengit pada 28 Oktober 1945 yang tidak dapat diatasi tentara Inggris, atas undangan Letnan Jendral Cristisen Bung Karno terbang ke Surabaya 29 Oktober 1945 untuk menghentikan pertempuran, dan usaha Bung Karno berhasil akhirnya Inggris mengadakan gencatan senjata.⁴³

Dengan situasi yang sangat buruk ini membawa cepatnya resolo jihad di seluruh Jawa dan Madura, terutama di Surabaya. Semangat jihad melawan sekutu membara dimana - mana, Pondok pesantren menjadi markas Hisbullah dan sabillillah. Sementara itu suasana gegap-gempita mewarnahi kehidupan masyarakat yang pada dasarnya hanya tinggal menunggu komando, karena itu mungkin sekali resolusi jihad itu kemudian memberikan inspirasi berkobarnya pertempu -

⁴²Chairul Anam, Op. Cit., hal. 125.

⁴³C.T.S. Kansil Dkk, Sejarah Perjuangan Pergerakan-Kebangsaan Indonesia, Jakarta, Cet VIII, 1986, hal. 74

B. NU Menjadi Partai Politik.

Untuk mencapai Indonesia merdeka, bagi umat-Islam diperlukan adanya kesatuan dan persatuan, sebagaimana fatwa KH. Hasyim Asy'ari yang dikutip Ainar dari bukunya Saifuddin Zuhri Guruku dan Pesantren halaman 83 "perkokoh persatuan karena orang lain juga memperkokoh-persatuan mereka kadang-kadang suatu kebatilan mencapai suatu kemenangan disebabkan mereka bersatu dan terorganisir dengan baik.⁴⁴

Kebulatan tekad sebagai realisasi dari pada persatuan dan kesatuan sangat diperlukan adanya suatu wadah organisasi politik Islam, sebagai sentralisasi perjuangan politik serta bersandarnya umat Islam dalam mengemudi setrategi perjuangan menyongsong Indonesia merdeka, demi tetap tegaknya panji-panji kebesaran Islam di bumi Nusantara ini.

Sesuai dengan manifesto politik wakil Presiden - Hata 1 November 1945 telah mendorong bangsa Indonesia untuk membentuk partai-partai dengan kata lain pemerintah telah memberikan kesempatan yang sama kepada berbagai macam partai politik pada saat itu.⁴⁵

⁴⁴Einar Martahan Sitompol, Op. Cit., hal. 88.

⁴⁵Syafi'i Ma'arif, Islam dan Masalah Kenegaraan, Cet, Pertama, 1985, LP3ES, Jakarta, 111.

Kesempatan itu dimanfaatkan dengan baik oleh ummat Islam. Pada tanggal 7-8 November 1945 ummat Islam mengadakan sebuah konggres ummat Islam untuk membentuk partai politik dengan nama Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia) bukan Masymi bentukan Jepang tahun 1943.⁴⁶ Masyumi bentukan konggres Jokja ini mendapat dukungan yang luar biasa dari para Ulama' moderen, tradisional, Jawa, Madura dan luar Jawa.

Dalam konggres November itu tercatat sebagai ketua panitia Muhammad Nasir dengan anggota Sukiman Wiryo Sanjoyo, Abikusumo Cokro Suyoso, A. Wahid Hasyim, Wali Al Fata, Srisultan Hamangkubuwono IX, Sri Pakualam dan Ghafar - Ismail.⁴⁷

Partai politik Masyumi ini mendapat dukungan dari seluruh organisasi Islam kecuali Perti. Terutama Muhamma - diyah dan NU, sampai ahirnya partai ini menjadi partai ter besar tampil dalam gelanggang partai politik ummat Islam Indonesia. Tampil sebagai pembela Demokrasi yang sangat tangguh dan keras dimasa orde lama sampai partai ini di-

⁴⁶ Syafi'i Ma'arif, Islam dan Politik di Indonesia - Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Cet. I, IAIN Sunan Kalijogo, 1988, hal. 30. Dia menjelaskan Masyumi yang berdiri 7-8 November 1945 sepenuhnya adalah hasil pimpinan-pimpinan Ummat Islam dalam sebuah konggres bertempat di gedung Madrasah Mu'alimin Yokyakarta bukan yang dibentuk Jepang pada tahun 1943.

⁴⁷ Ibid, hal. 31.

bubarkan tahun 1960.⁴⁸

Dalam kongres itu diputuskan bahwa 1. Masyumi -
adalah satu-satunya partai politik Islam Indonesia. 2. Ma-
syumilah yang akan memperjuangkan politik ummat Islam
Indonesia.

Dalam pereode awal itu kepengurusan Masyumi terdiri
Majlis Syuro yang diketahui oleh Dr. Sukiman Sanjoyo. De-
ngan waktu yang singkat partai ini sudah menjadi partai
yang besar hal ini tentu saja karena waktu itu Masyumilah
yang menjadi satu-satunya partai politik Islam Indonesia.

Sejak berdirinya Masyumi tahun 1945 sampai pertenga-
han tahun 1947 partai ini mulai terasa agak goncang, ke-
goncangan partai ini berasal dari tubuh partai itu sendiri
Ketika unsur PSII merasa tidak puas dengan kabinet yang -
ada serta sikap Masyumi yang tampak beroposisi.⁴⁹ Bahkan
kegoncangan dan perpecahan-perpecahan tersebut lebih

⁴⁸ Dengan dikeluarkannya keputusan Presiden nomor -
200 1960 yang diumumkan pada tanggal 13 September 1960 -
pimpinan Masyumi menyatakan partainya bubar untuk memenuhi
keputusan Presiden. Hilangnya Masyumi dan PSII dari pela -
sejarah moderen Indonesia dapat dikatakan robohnya pilar -
pilar Demokrasi dan merapuhnya Indonesia sebagai negara
hukum yang dengan gigih memperjuangkan oleh mendiang kedua
partai ini, Ibid, hal.31.

⁴⁹ Lihat B.J. Bolan, Pergumulan Islam di Indonesia ,
hal. 41 Dia menjelaskan bahwa perpecahan pertama dalam -
Masyumi terjadi dalam bulan Juli 1947. Sejumlah anggota
dibawah pimpinan Wondo Amiseno dan Aruji Karta Winata men-
dirikan kembali partai PSII yang lama agar dapat duduk -
dalam kabinet sayap kiri Amir Syarifuddin sewaktu Masyumi-
bersikap sebagai partai oposisi.

tegang lagi setelah perubahan sikap Masyumi ini merembet pada golongan Nahdlatul Ulama'.⁵⁰

Perubahan sikap inilah yang mengakibatkan kegagalan dalam mengarahkan dan menyalurkan semangat golongan yang hidrogen itu, kemudian selanjutnya membawa partai ini berhadapan dengan masalah-masalah interen yang serius dalam tubuhnya. Hal ini bisa dilihat dari kasus keluarnya PSII dan NU dari Masyumi.⁵¹

Masyumi sejak kongresnya di Yogyakarta ahir tahun 1949 diubah sedemikian rupa, dimana Majelis Syuro yang merupakan tempat penting bagi para Ulama' dan pemimpin-pemimpin Islam tidak lagi dijadikan sebagai badan legeslatif disamping DPR, melainkan hanya dijadikan badan penasehat saja. Segala persoalan hanya dari jurusan politik saja dengan tidak mengambil pedoman agama.⁵²

Dengan demikian Masyumi memperlihatkan wataknya sebagai partai semi sekuler dengan meninggalkan fatwa-

⁵⁰ Ibid, Hal. 141. Kembali Bolan menjelaskan tetapi yang lebih serius adalah ketegangan antara sikap kiri Masyumi progresif yang terdiri dari para unsur sosialis agama dan golongan konserfatif yang terdiri dari para kyai dan ualama'. Ketegangan ini kemudian berkembang menjadi perpecahan yang akan memberi bekas pada pertentangan umat Islam Indonesia baru dimasa selanjutnya.

⁵¹ Fahri Ali Dan Bahtiar Efendi, Merambah Jalan Baru Islam, Mizan, Bandung, 1986, hal. 92.

⁵² Deliar Noer, Partai Politik Di Pentas Nasional, Grafiti, Jakarta, Cet, Pertama, 1987, hal. 80-81.

Fatwa Ulama' yang ada dalam Majlis Syuro. Pada hal menurut NU Majlis syuro yang telah diputuskan dalam konggres tahun 1945 itu adalah berfungsi sebagai badan yang dipimpin oleh para ulama' terkemuka yang bertugas memimpin keputusan - keputusan serta kebijaksanaan Majlis partai yang dianggap bertentangan dengan Islam.⁵³

Menurut NU dengan adanya reorganisasi itu maka berarti Masyumi menjadi organisasi yang tidak menghormati - Ulama'. NU merasa kehilangan jati dirinya. Ia merasa semakin tersisih karna peranan orang-orang NU dalam Masyumi - terus menerus dikurangi.⁵⁴ Apalagi tuntutan NU atas menrti agama tidak terpenuhi dimana menteri agama jatuh ketangan KH. Faqih Usman.⁵⁵

⁵³ Selamat Evendi Yusuf Dkk, Dinamika Kaum Santri, - Rajawali, Jakarti, t, t., hal. 41.

⁵⁴ Ibid, hal. 42.

⁵⁵ Pemungutan suara dilakukan dua kali. Dalam pemu - ngutan suara pertama dua calon NU yaitu KH. Masykur dan KH. Fathur Rahman. Masing-masing memperoleh satu suara Faqih Usman yang memperoleh 4 suara pernah menjadi Menteri Agama pada Kabinet Republik Indonesia Yokyakarta tahun - 1950. Calon-calon ialah Usman Ralibi 2 suara Kasman Singo - dimejo, H. Ilyas Ya'kub dan Ali Akbar. Masing- masing 1 suara Zainal Abidin Ahmad tidak memperoleh suara sama se - kali.

Pemungutan suara kedua diadakan antara Faqih Usman dan Usman Ralibi, mendapat 5 suara dan Usman Ralibi menda - pat 4, Seorang blang kosong. Jadi Faqih Usman menjadi ca - lon tunggal. Lihat Deliar Noer, Partai Politik di pentas Nasional, Catatan kaki hal. 68 dan selanjutnya Ibid hal. 340. Noer kembali menjelaskan NU memang sangat menginginkan - Menteri agama karena itu sangat berguna dalam penyebaran - pengaruhnya ke penjuru plosok tanah air ini terbukti dari 23 Kabinet 1946-1965 hanya tiga kali yaitu M. Rosyidi 1946 Faqih Usman (1952-1953) dan Teuku M. Hasan (1949) dua - dari Muhammadiyah dan satu idependen.

Tanpa berfikir panjang lagi segera saja NU mengambil langkah yang tegas menuju jalan penyelesaian, NU segera mengadakan kongresnya yang ke 19 di Palembang tahun 1952.

Dalam kongres ke 19 itu NU menyatakan keluar dari Masyumi dan menyatakan dirinya menjadi partai politik.⁵⁶ Keputusan itu kemudian dituangkan dalam keputusan PB NU yang kemudian terkenal dengan keputusan PB NU tanggal 5-6 April 1952.⁵⁷

Dalam muktamar itu hadir pula ketua umum Masyumi Dr. Sukiman. Sebelum adanya keputusan, NU masih sempat bargening dengan tokoh Masyumi itu, namun memang rupanya jurang pemisah sudah tidak mungkin tertutup kemabali. Terpaksa NU harus memisahkan diri dengan Masyumi. Dr. Sukiman cukup menghayati perasaan apa yang sebenarnya menjadi sebab jurang pemisah sehingga terjadi keputusan itu.

Para utusan muktamar memang merasakan semakin menipisnya para ulama' dalam Masyumi dan semakin menipis-

⁵⁶ Tanggal 1 Mei Jam'iyah Nahdlatul Ulama' mengadakan muktamar di Palembang dan memproklamkan NU keluar dari Masyumi dan menjadikan dirinya partai politik. Dalam muktamar tersebut sengaja didatangkan juga ketua umum Masyumi Dr. Sukiman agar dapat mengambil bagian dalam musyawarah tentang keluarnya NU dari Masyumi. Untuk melaksanakan keputusan tersebut dibentuk panitia untuk merundingkan dengan pihak Masyumi. Lihat Saifuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Umat Islam Dan Peranannya Di Indonesia, PTAI Ma'arif, Bandung, Cet. Pertama, 1979, hal. 641-642.

⁵⁷ Chairul Anam, Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama', Op, Cit., hal. 195.

nya keinginan untuk memberikan pendidikan yang lebih besar kepada agama dan bangsa.

Sekalipun demikian NU mempunyai kebijaksanaan bahwa muktamar memberikan mandat kepada PB NU supaya segera memberikan keputusan :

1. Pelaksanaan keputusan tersebut agar jangan sampai menimbulkan kegoncangan dikalangan umat Islam Indonesia
2. Pelaksanaan keputusan tersebut dilaksanakan dengan perundingan terlebih dahulu dengan Masyumi dan
3. Keputusan ini dijalankan dengan hubungan yang lebih luas berkenaan adanya keinginan untuk membentuk Dewan pimpinan umat Islam yang nilainya lebih tinggi, dimana partai-partai dan organisasi Islam baik yang sudah tergabung maupun yang belum tergabung dalam Masyumi dapat berkumpul dan berjuang bersama.⁵⁸

Dan disaat itu juga NU segera memutuskan beberapa pokok pikiran yang sangat erat kaitannya dengan masalah politik yaitu :

1. Mendesak pemerintah RI. Agar segera mengadakan pemukiman umun.
2. Menyetujui kehendak pemerintah RI. Untuk mengadakan penghematan dan membasmi pengeluaran yang tidak jujur.
3. Mendesak pemerintah agar menggiatkan pendidikan dan dan pancasila secara teratur dengan baik bersungguh -

⁵⁸ Selamat Evendi Yusuf Dkk, Op. Cit., hal. 42-43.

hususnya tentang sila ketuhanan yang maha Esa yang tampaknya kurang mendapat perhatian.⁵⁹

Sejak keputusan NU Palembang itu NU memasuki lembaran baru dalam sejarah perjuangan yang sangat luas. Tentu saja orientasi NU bukan saja pada masalah-masalah keagamaan akan tetapi sudah mengarah pada masalah-masalah politik. AD/ART sudah tidak bernama jam'iyah lagi tetapi sudah AD/ART partai politik, yang berbunyi NU berazaz agama Islam dan bertujuan menegakkan syari'at Islam dengan berhaluan dari salah satu madzhab empat, Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Kedua melaksanakan hukum-hukum Islam dalam masyarakat.⁶⁰

Begitu juga dengan program kerjanya semakin meluas meliputi bidang pertahanan dan keamanan, baik politik dalam negeri maupun politik luar negeri, pendidikan, sosial budaya dan lain sebagainya.

Sebagai organisasi yang pada mulanyalahir dengan motif keagamaan tentu saja tidak melupakan karakteristik perjuangnya. Walaupun Ia sudah bergumul dengan partai-politikanamun dalam pola keorganisasiannya masih tetap pola organisasi jam'iyah. NU tetap mempertahankan setruktur kepemimpinan formalnya dalam apa yang disebut Syuriyah dan tanfidiyah, yakni menempatkan ulama' pada posisi

⁵⁹Chairul Anam, Op. Cit., hal. 159.

⁶⁰Abdul Basid Adnan, Kemelut Di NU Antara Kyai Dan Politisi, Mayasari, Solo, Cet, Pertama, 1982, hal. 15.

paling atas. Selain itu mengenai kenggotaan juga masih dipertahankan harus orang Indonesia yang beragama Islam dan berhaluan ahlussunnah wal jama'ah.⁶¹

Dengan beralihnya NU kepartai politik ini NU benar-benar ditempuh dengan uji coba yang sangat berat NU banyak menghadapi tantangan dan rintangan serta kesulitan yang senantiasa mengganggu jalannya perjuangan, baik tantangan itu datangnya dari dalam tubuh partai itu sendiri maupun dari luar.⁶² Sedang faktor lainnya misalnya-NU sangat kekurangan tenaga-tenaga akademis lebih-lebih tenaga sarjanah. Sehingga dikatakan sulitnya mencari sarjanah pada masa itu sama dengan sulitnya mencari penjual es krim ditengah jam satu malam. Dengan demikian NU sulit untuk menangani tugas-tugas kepartaian, NU tidak mempunyai tenaga ahli dalam pemerentahan, misalnya, dalam hubungan internasional, perburuhan, perhutanan dan keamanan

⁶¹Chairul Anam, Op. Cit., hal. 196.

⁶²Lihat Chalid Mawardi, Op. Cit., -29-31. Dia Menjelaskan pertama dari tubuhnya NU itu sendiri mengalami kesulitan yang tidak kecil. Cukup banyak tokoh NU, Pemuda-Ansor yang menentang pendirian PB NU yang telah memisahkan diri dengan Masyumi. Reaksi interen karna adanya sala-pengertian, mereka termakan oleh propaganda Masyumi yang menuduh NU sebagai pemecah belah uhuwah Islamiyah. Tetapi semua itu dapat diatasi dengan memberikan pengertian yang jelas dan gamblang.

Kedua dari luar yaitu dari Masyumi. Ucapan Yusuf Wibisono misalnya seolah seperti komando bagi seluruh pimpinan Masyumi berkampanya anti NU. Bahkan ada yang keliatat batas Ia berkata kalau KH. Wahab dicukur dengan beling dan disiram air jeruk maka keluarlah dari kepala pak Wahab palu dan arit.

serta kemiliteran.⁶³

Melihat kenyataan diatas tentunya kata bisa memahami keberadaan NU yang sebenarnya, memang sejak awal dirinya organisasi ini bertumpu pada gerakan keagamaan. Ia tidak pernah bermimpi bahwa dirinya akan menjadi partai politik. Maka sudah barang tentu kader-kadernya hanya digembleng dalam dunia pondok pesantren untuk dicitak menjadi kader ulama' dan kyai yang nantinya kader ini diharapkan mampu mengemban tugas suci keagamaan.

Apa lagi sebagian ulama' NU banyak yang apatis karena mereka sudah lama tersingkir dari percaturan politik. Inilah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh NU pada masa awal berdirinya jadi partai politik.

Dalam menghadapi kondisi yang demikian itu NU tetap tabah dan selalu menyusun strategi menuju jalan keluarnya :

1. Partai NU mengambil keputusan untuk duduk dalam kabinet Ali Wongso Zainal atau kabinet Ali II. Keputusan itu adalah penting untuk memperkuat posisi NU dalam percaturan politik dan mencari backing politik yang kuat untuk mengimbangi offensive politik dari Masyumi. Dengan jumlah perwakilan yang kecil didalam perwakilan parlemen 8 orang memegang kedudukan yang cukup penting

⁶³Ibid, halaman. 30.

dalam kabinet Ali anantara lain kursi wakil PM dan -
mentri dalam negri.

2. Berusaha mempercepat dilaksanakannya pemilihan umum. NU sadar bahwa jumlah perwakilan yang dimilikinya dalam parlemen lebih kecil bila dibandingkan dengan potensi partai NU riel partai NU dalam masyarakat. Oleh karena itu menteri dalam negri Sunaryo SH, dalam kedudukannya dalam kabinet ditugaskan untuk mempercepat disahkannya RUU, pemilihan umum itu. Ketika kabinet Ali I jatuh RUU pemilihan umum sudah disahkan dan menteri dalam negri Sunaryo SH sudah berhasil mengeluarkan -
anggaran belanja untuk pemilihan umum.
3. Membangkitkan gairah perjuangan para ulama' yang sudah bertahun lamanya tersingkir dari gelanggang politik, baik disebabkan oleh permainan politik kaum intelektual Masyumi atau oleh sebab yang lain. Dengan modal para ulama' dan kyai yang sadar politik ini partai NU dengan cepat mengembangkan sayapnya menggugah kaum mudah ahhlussunnah wal jama'ah.
4. Ketika kabinet Ali I jatuh, dibentuklah kabinet Burhanuddin Harahab NU ikut didalamnya. Hanya untuk menjaga agar pemilihan umum dapat dilaksanakan benar pada waktunya. Dan setelah pemilihan umum diselenggarakan, -
perselisihan mengenai politik luar negri antara NU dan Masyumi timbul kembali. Kali ini mengenai perundi-

ngan Indonesia dengan Belanda di Denhag, mengena'i soal Irian Barat. Menurut pandangan NU delegasi Indonesia yang dipimpin Anak Agung Gede Agung keliwat meminta-minta sehingga menjatuhkan pristise Indonesia di mata dunia.⁶⁴

Akan tetapi kita dapat melihat bahwa setrategi politik NU itu berhasil. Hal ini dapat dibuktikan setelah diadakan pemilihan umum tahun 1955 ternyata NU telah keluar sebagai sala satu partai besar. Keberhasilan NU pada waktu itu sama sekali diduga oleh partai-partai politik yang lai. Sehingga kenyataan inilah yang mengejutkan pengamat-pengamat politik pada waktu itu baik dari dalam maupun dari luar.

Sebagaimana yang telah kita singgung diatas bahwa sejak tahun 1952 Nahdlatul ulama' memisahkan diri dari Masyumi dan menjadikan dirinya sebagai partai politik.

Selama NU belajar berkecimpung dalam arena politik tentu saja banyak mengalami sandungan-sandungan batu kerikl yang tajam. Terutama dalam menghadapi isu politik Nasional yang masih belum setabil. Namun demikian ia tidak mau tergopoh-gopoh dalam mengambil suatu keputusan. Ia takut terjebak dalam lumpur yang dalam pemimpin-pemimpin partai politik yang lain mengatakan bahwa NU adalah benar-benar partai yang konserfatif dan motto utamanya-

⁶⁴Ibid, hal. 31.

adalah "awa, hati-hati".⁶⁵

Dengan didasari rasa hati-hati dan waspada ini nampaknya NU agak luwes saja. Bahkan bisa dikatakan NU lebih bisa bertahan dibandingkan dengan partai-partai politik lainnya.

NU mempunyai andil besar dalam merintis perjuangan kemerdekaan Indonesia yang disponsori para ulama' dan kyai khususnya se Jawa Madura dan Sumatra. Selanjutnya NU meletakkan jasa yang tidak kecil nilainya. Ia mempunyai jasa-jasa yang sangat besar dalam mengisi kemerdekaan yang telah diraihnya. Jasa-jasa itu diantaranya adalah:

1. Menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1952. Terlaksana berdasarkan policy menteri dalam negeri MR. RHA. Sunaryo SH. Tokoh NU. Pemilu pertama ini berjalan dengan penuh demokratis, bebas tanpa ada sedikitpun tekanan dan penuh rahasia.
2. Lahir PP 10 hasil policy menteri perdagangan Drs. Rahmat Moejiseno (tokoh NU) yang isinya membatasi langkah ekonomi golongan Asing untuk melindungi ekonomi pribadi.
3. Atas inisiatif menteri agama KH. Wahid Hasyim (PBNU) maka disetujuiilah Masjid Istiqlal Jakarta. Sedang pe -

⁶⁵ Clifford Gertz, Abangan Santri Priyayi Dalam Masyarakat Jawa, Pustaka Jaya, 1987, hal. 223.

laksanaannya oleh menteri agama KH Ilyas (PB NU). masjid ini akhirnya menjadi masjid terbesar diseluruh Asia Tenggara.

4. Pendirian IAIN pertama kali oleh menteri agama KH Wahib Wahab. (PB NU).
5. Usaha menterjemahkan Al Qur'an kedalam bahasa Indonesia atas inisiatif KH Saifuddin Zuhri (PB NU).
6. Menyelenggarakan MTQ yang pertama atas inisiatif menteri agama KH Dahlan (PB NU).⁶⁶
7. Menggagalkan realisasi Nasakom yang dikampanyakan oleh Presiden Soekarno selama bertahun-tahun, dan sikap NU membatasi jumlah kedutaan besar Sfyet Rusia, serta menggagalkan terbentuknya kabinet berkaki empat PWI, Masyumi, NU dan PKI. Ia melakukan perlawanan langsung segala aksi-aksi PKI. NU partai pertama yang mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar membubarkan PKI yang terang-terangan mendalangi G 30 S. Sikap NU tersebut dicetuskan pada tanggal 5 Oktober 1965. Ketika itu masyarakat Indonesia belum memperoleh informasi yang jelas tentang a. b. c. Nya G 30 S. PKI.
8. Mempertahankan HMI dan Gasbindo yang akan dibubarkan oleh pemerintah akibat intrik PKI, namun menteri agama KH Saifuddin Zuhri mempertahankan kedua organisasi -

⁶⁶Ke-NU-An, Buku Ke Tiga, Pengurus Wilayah Ma'arif NU Daerah Istimewah Yogyakarta, 1981, hal. 64-65.

Islam itu dengan mempertahankan duduknya dalam kabinet. Menteri agama tidak bisa mempertanggungjawabkan secara morel maupun politik, bahwa dalam masa jabatannya untuk melindungi serta membimbing umat Islam bisa terjadi - pembubaran dua organisasi Islam itu.

9. NU memelopori pembentukan program pancasila (H. M. Subhan ZE) sebagai landasan pertasan pertama lahirnya orde baru.⁶⁷

Ketika Indonesia sedang mengadakan hubungan diplomatik dengan Uni Sofyet NU berusaha bersih keras menentang pemerintah agar hubungan diplomatik itu digagalkan tapi usaha itu tidak berhasil, karena politik negara yang bebas aktif. Terpaksa NU membatasi jumlah diplomatik Uni Sofyet sebanyak 6 orang. Usaha selanjutnya NU mengusulkan agar pemerintah berusaha menyehatkan ekonomi Nasional. National plain board dan badan tersebut supaya dipimpin langsung oleh wakil Presiden sendiri yaitu Bung Hata.

Gagasan inilah yang kemudian hari melahirkan Depernas (Dewan Perancang Nasional) dan Bapernas (Badan Perancang Nasional) yang ahirnya berkembang menjadi Repelita dan Pelita ini.⁶⁸

⁶⁷ Titik Kebangkitan Ummat Islam dan Peranan NU di Indonesia, Op, Cit., hal. 135-136.

⁶⁸ KB-NU-AN Buku Ke Tiga, Op, Cit., hal. 67. Dan Untuk lebih jelasnya lihat! Clifford Gertz, Op, Cit., hal-229.

C. Posisi NU Setelah Pemilihan Umum Tahun 1955.

Untuk melaksanakan Demokrasi dan untuk mengikutsertakan rakyat dalam menentukan wakil dan calon yang harus duduk dalam pemerentahan, maka pada tahun 1955 diadakan pemilihan umum yang pertama sejak Indonesia - merdeka.

Rancangan Undang-undang pemilihan ini ditandatangani oleh parlemen pada tanggal 25 November 1952 dan disahkan 4 April 1953.

Rancangan ini dirancang dan disahkan oleh Kabinet Wilopo. Tetapi tidak lama ahirnya Kabinet jatuh dan diganti Kabinet Ali yang pertama. Masa kampanye Kabinet ini pun jauh sebelum dilaksanakannya pemilu.

Kabinet ini diganti oleh Kabinet Burhanuddin - Harahab pada tanggal 12 Agustus 1955. Kabinet ini adalah Kabinet Kualisi dengan Masyumi sebagai intinya. Sedangkan PNI menjadi partai oposisi. Pada masa Kabinet inilah diselenggarakan pemilihan umum yang pertama. Kabinet menyerahkan mandatnya pada bulan Maret 1956 dan digantikan oleh Kabinet Sastro Amijoyo yang kemudian dikenal sebagai Kabinet Ali II, dan dilantik pada tanggal 24 Maret 1956.

Pemilihan umum pertama diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 yang menghasilkan sebanyak - 27 orang DPR, yang masing-masing anggota DPR memiliki

300.000 orang penduduk dan 452 anggota konstituante. DPR hasil pemilu ini dilantik pada tanggal 10 Nofember 1956.⁶⁹

Untuk pemilihan umum pertama ini diikuti oleh 37.875.299 dari 43.104.464. Yang terdaftar. Oleh karena sukar nya alat perhubungan waktu itu sehingga tidak bisa dilaksanakan satu hari. Apa lagi di daerah terpencil di kepulauan Indonesia yang jumlahnya ribuan 87,65 persen pemilih mempergunakan hak pilihnya. Semua suara tersebut berasal dari seluruh jumlah penduduk sebanyak 77.987.879. Di tahun 1954 menurut perhitungan panitia pemilihan umum Indonesia (PPI).⁷⁰

Ternyata NU dalam pemilihan umum pertama ini hasil sangat mengejutkan bagi partai-partai lain. Partai Nahdlatul Ulama' melompat menduduki partai ke 3 dari empat partai -partai besar di tanah air ini. Dari 8 orang anggota dalam parlemen melompat menjadi 45 orang. Kata Saifuddin Zuhri pastilah posisi politik seperti itu tidak akan mungkin pernah terjadi jika NU berada dalam Masyumi. Partai-partai Islam mencapai jumlah 114, dari 157 seluruh anggota. Yakni Masymi 57, NU 45, PSII 8 dan Perti 4, dalam Kabinet dari 25 seluruh menteri 13 diduduki partai -

⁶⁹P Dan K 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964, PT-Citra Lantora Gung, Persada, Jakarta, 1985, hal.88.

⁷⁰H. A. Basit Adnan, Ada Apa Di PPP, Mayasari, Solo 1989, hal. 17.

partai Islam. Dari Masyumi 5 orang Mr. Muhammad Rum (wakil perdana menteri I) Mr. Mulyono (kehakiman) Suharjo Sukmana (perburuhan) dan Syamsuddin (kesejahteraan). Nahdlatul Ulama' 5 orang KH Idham Chalid (wakil perdana menteri II) Mr. Burhanuddin (perekonomian) KH Fatah Yasin (sosial) Mr Sunaryo (dalam negeri) dan KH. Ilyas (mentri agama). PSII 2 orang, Sudibyo (penerangan) dan Syeh Marhaban (wakil menteri pertanian). Perti 1 orang, KH. Rusli Abdul Wahid (mentri negara).⁷¹

Dengan selesainya pemilihan umum pertama tahun 1955 maka dibentuklah kabinet Ali Sastro Amijoyo Muhammad Rum Idham Chalid (PNI, Masyumi, NU). Kabinet ini mendapat sokongan kuat dalam parlemen itu dengan mayoritas mutlak, kecuali PKI.

Perjalanan Kabinet Ali Rum Idham ini tidak lama (Maret 1956-1957), karena Masyumi dan partai lain sering tidak sependapat dalam menghadapi isu-isu politik. Disamping itu sikap oposisi Presiden Soekarno sejak awal dibentuknya Kabinet ini ia menggunakan Kabinet berkaki empat (PNI- Masyumi-NU dan PKI). Namun NU dan Masyumi menolak Kabinet PKI masuk dalam Kabinet.⁷² Bahkan gagasan -

⁷¹ Saifuddin Zuhri, Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya Di Indonesia, PT Al Ma'arif, Bandung, Cet Pertama, 1979, hal. 642-643.

⁷² Ahmad Syafi'i Ma'arif, Islam Dan Masalah Kenegaraan, LP3S, Jakarta, 1985, hal. 642-643.

itu tidak disetujui oleh wakil Presiden Muhammad Hata.⁷³

Sejak Soekarno mulai mengutak atik konsepsi politik-nya ini maka NU telah melampaui zaman kegoncangan - kegoncangan yang silih berganti karna krisis politik dan pergolakan -pergolakan di daerah yang sering terjadi. Gagasan-gagasan Demokrasi Terpimpin (golongan Karya) golongan fungsional golongan sosialisme, dan lain-lain yang melanda tanah air, maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Saifuddin Zuhri bahwa masa itu adalah masa yang paling berat bagi perjuangan bangsa Indonesia, terutama umat Islam.⁷⁴ Apa lagi pada saat itu Dr Muhammad Hata meletakkan jabatannya dari wakil Presiden.⁷⁵

⁷³Gagasan Bung Karno itu lagi-lagi ditentang oleh Bung Hata. Beberapa kali Bung Hata mengadakan pembicaraan Bung Karno tapi selalu mengalami kegagalan. Bung Karno tetap menginginkan dibentuknya Kabinet berkaki empat dengan inti partai-partai besar yaitu PNI- Masyumi- NU dan PKI. Tapi Bung Hata tidak setuju dengan alasan bahwa dasar politik PKI berbeda dengan partai-partai politik yang lain. PKI adalah cabang yang tunduk kepada gerakan Komunis internasional dengan menggunakan sistim diktator proletar dalam mencapai tujuan politiknya. Bila PKI berhasil membawa Kabinet kepada politik Komunis yang tunduk kepada gerakan Komunis internasional, maka Indonesia telah mengagalkan bebas aktifnya. Lihat, Syahbuddin Mangandaralam, Apa Dan Siapa Bung Hata, PT Rusda Jaya, Jakarta, t, t., - hal. 73

⁷⁴Syaifuddin Zuhri, Op, Cit., hal. 651

⁷⁵Lihat Syahbuddin, Op, Cit., hal. 37. Selanjutnya Ia mengatakan bahwa pada tanggal 20 Juli 1956 Bung Hata mengirimkan surat ke Bung Karno dan kepada Kabinet bahwa Ia minta izin berhenti dari jabatannya tetapi permohonan itu tiada ditanggapi oleh Presiden Soekarno. Kemudian 23 Nofember 1956 Bung Hata menyatakan Ia akan meletakkan jabatannya pada tanggal 1 Desember tahun itu juga.

Dengan mundurnya Hata dari wakil Presiden Republik Indonesia ini maka berahirlah kerja sama duwi tunggal Soekarno Hata, dan tinggal masyarakat atau umat Islam - yang merasa prihatin dan sedih atas perpecahan yang terjadi di pucuk pimpinan negara. Sedangkan PKI merasa lega karena ia merasa telah bebas dalam mempengaruhi Bung Karno untuk merumuskan garis-garis besar haluan negara - yang sesuai dengan politik mereka.

Setelah Bung Hata mengundurkan diri dari jabatan wakil Presiden RI, Indonesia benar-benar dalam keadaan gawat, banyak terjadi pemberontakan di Daerah-daerah - karena ketidak puasan terhadap pemerentahan terasa makin meningkat, peristiwa perebutan kekuasaan angkatan darat yang dipimpin oleh kolonel Zul Kifli Lubis, peristiwa itu dapat digagalkan oleh staf angkatan darat (KASAD) Mayor Jendral Nasution. Di Padang terjadi pergolakan pada tanggal 20 Desember 1956 yang dipimpin oleh Dewan Banteng memaksa gubernur Sumatra Ruslan agar menyerahkan kekuasaannya kepada Letkol Ahmad Husen. Pada bulan Desember 1956- di Sumatra Utara terjadi pemberontakan Dewan Gajah yang dipimpin kolonel Simbolon. Ia menyatakan diri berpisah dengan pemerentahan pusat. Pada 2 Maret 1957 terjadi pemberontakan Permesta dipimpin kolonel V Sumal Dengan memproklamirkan piagam (PERMISTA) kemudian menyusul di Sumatra Tengah berdiri pemerintah Revolusioner Republik

Indonesia (PRRI) yang menyatakan diri berpisah dengan pemerintahan pusat.⁷⁶

Ditengah-tengah situasi negara yang genting itu NU mengadakan muktamar ke 21 di Medan pada bulan Desember 1956, untuk membahas posisi NU dalam menghadapi situasi politik, disamping masalah-masalah agama yang penting untuk dibahas.

Dalam menghadapi situasi yang serba kritis itu peserta muktamar memandang bahwa perlunya seorang pemimpin yang benar-benar handal. Artinya pemimpin itu bukan saja mengerti dalam bidang agama tetapi juga memahami tentang percaturan politik pemerintahan. Sesuai dengan tuntutan itu, maka terpilihlah KH. Idham Chalid sebagai ketua umum PB NU dan KH Saifuddin Zuhri sebagai sekretarisnya. Karena Idham Chalidlah yang dipandang lebih berkualitas dalam masalah politik kenegaraan, disamping itu juga mumpuni dalam Ilmu agama. Apa lagi Idham Chalid dipandang sebagai perdana menteri dalam Kabinet ARI.

Dengan terpilihnya Idham sebagai ketua PB NU sedikit NU lebih maju dalam kepartaian karena posisi NU bertambah baik.

Demi tetap baiknya posisi NU serta partai politik-lainnya kata Anam Idham ingin menggalang persatuan dika-

76

Chairul Anam, Op. Cit., hal. 32.

langu Ummat Islam, hususnya dalam Konstituante dan Kabinnet ARI harus dipertahankan meskipun harus menghadapi berbagai tantangan. Kita harus tetap mempertahankan Kabinnet yang mayoritas diduduki ummat Islam, sebab apabila negara sudah diumumkan dalam keadaan bahaya, darurat, maka peranan partai politik akan merosot dan seluruh kekuasaan akan berpusat ditangan militer.⁷⁷ Namun sayang, keinginan-Idham itu tidak mendapatperhatian dari Masyumi sebagaimana yang dikutip oleh Chairul Anam dari Idham Chalid:

....Sejak meletusnya pemberontakan Simbolon mulailah masa mendung dalam suasana Indonesia, mulailah duka cita yang berlarut-larutrejim Simbolon yang sedang mabuk kekuasaan telah membatasi kekuasaan kitakeselamatan jiwa kita terancam. Tetapi semua itu tidak kita ucapkan dengan kata - kata tetapi mata bertemu mata, hati bertemu hati, semuanya kita didalam batin dan sirrinya menjerit, menangis dan memohon kepada Allah Maha pelindung, agar negara dan kita sekalian diselamatkan dari bencana orang-orang - yang menyeleweng dan sedang mabuk kekuasaan itu. Tetapi dalam suasana seperti itu tiba-tiba Masyumi menarik Mentri-Mentrinya dari Kabinnet. Meskipun NU. Telah memikirkan akibat dari penarikan Mentri itu, Namun amar ma'ruf NU kepada Masyumi tidak digubris. Sehingga Kabinnet Ali-Rum-Idham bubar pada tanggal 14 Maret 1957 dan negara diumumkan dalam keadaan SOB bahaya.⁷⁸

Dari sini dapat ditarik benang merah bahwa persaudaraan ummat Islam pada waktu itu tidak ada suasana keak

77

Chairul Anam, Op, Cit., hal. 207.

78

Ibid, hal. 206-207.

raban dalam berpolitik sebagaimana yang dikatakan oleh Anam. : meskipun NU tidak mau menuduh Masyumi sebagai hianat terhadap Kabinet, NU tetap menamakan Masyumi sebagai tidak fer dalam berpolitik sesama partai Islam. Mengenai sikap Masyumi ini sebagaimana penjelasan Idham Chalid yang dikutip Chaitul Anam sebagai berikut :

"Ya kita orang Islam terutama para alim ulama' dan pimpinan yang selalu berhusnudlan, yang selalu memegang kata-kata, janji-janji sebagai ukuran moral dan iman tidak jarang menjadi koban dan permainan orang, terutama orang-orang yang keagungan karirnya tidak setaraf dengan keagungan akhlaknya, yang menganggap⁷⁹ janji dan omongan adalah suatu kembang bibir saja.

Dengan bubarnya Kabinet Ali Rum Idham diumumkankannya Indonesia dalam keadaan darurat (Bahaya) peranan parlemen dan partai-partai politik NU menjadi merosot. Pusat kekuasaan bukan ditangan parlemen tapi ditangan Presiden Soekarno.

Presiden Soekarno segera saja menunjuk dirinya menjadi badan formatur dan segera membentuk Kabinet baru pada tanggal 9 April 1957. Kabinet ini bernama Kabinet Karya dengan Ir Juanda sebagai menteri I II dan III.

Selain itu ditunjuk pula dari NU KH Idham Chalid KH Ilyas, sebagai menrti Agama Mr Sunaryo sebagai menteri agraria Prof Drs Sunaryo sebagai menteri perdagangan, kemudian Kabinet ini mengalami perubahan yaitu ditambah

⁷⁹Ibid, hal. 207

KH Wahib Wahab sebagai menteri urusan kerja sama sipil militer, dan Prof Drs Sunaryo diangkat sebagai duta besar Republik Indonesia.⁸⁰

NU sadar bahwa pembentukan dengan cara main tunjuk itu adalah menyalahi prinsip Demokrasi bahkan sikap seperti itu tidak ubahnya merupakan penurunan prestise politik, namaun apa boleh buat kenyataan memang memaksa demikian. NU tidak mungkin dapat berbuat lebih banyak lagi terhadap politik Presiden Soekarno. Soekarno merupakan satu-satunya orang kuat pada waktu itu. NU tidak mungkin dapat melawan kehendak Presiden itu. Hanya saja NU menyadari bahwa peristiwa itu adalah benar-benar hal ihtiyari artinya suatu peristiwa diluar batas kemampuan yang tidak dapat dihindari. Kalu NU menerima putusan Presiden Soekarno berarti NU ikut melestarikan kediktatoran, jika menolak berarti memberi peluang bagi golongan kiri untuk berkuasa.

Untuk menjawab berbagai persoalan politik yang sangat rumit, hususnya tentang sikap PB NU didalam menerima penunjukan Presiden Soekarno untuk duduk dalam Kabinet Karya ini NU mengambil keputusan diantaranya PB NU memberi kesempatan pada anggota NU yang ditunjuk kepala Negara untuk duduk dalam Kabinet Karya dan Dewan Nasional-

⁸⁰ Ibid, hal. 208.

dipandang sebagai mendahulukan usaha mencegah datangnya -
 madlarot yang lebih besar. Hal mana sesuai dengan ka'idah
 "Dar'ul Mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashalih". Adapun
 madlarot yang lebih besar itu adalah :

- a. Tempat yang disediakan bagi NU dapat diduduki anasir
 lain yang membahayakan.
- b. Kedudukan partai NU sebagai oposisi yang belum disiap-
 kan akan bisa merupakan suatu bencana yang tidak diha-
 rapkan.⁸¹

Adapun mengenai masuknya golongan fungsional dalam
 DPR, pendirian NU diumumkan secara terbuka golongan fung-
 sional karya penting kedudukannya dalam Negara dan masya-
 rakat disamping golongan politik. Akan tetapi seperti ju-
 ga golongan politik, maka masuknya golongan tersebut ke-
 dalam DPR dan MPR harus melalui pemilihan umum yang Demok-
 rasi dan rahasia.

Pemilihan umum merupakan jalan wajar untuk proses
 penyederhanaan kepartaian melalui Undang-undang pemilihan
 umum dan kepartaian Demokratis. Adapun masalah ABRI NU
 dapat menyetujui duduk mereka dalam DPR dan MPR atas
 dasar pengangkatan berdasar imbangan yang adil dan bijak-
 sana.⁸²

⁸¹ Ibid, hal. 210.

⁸² Saifuddin Zuhri, Op. Cit., hal. 652.

tempuran 10 Nofember 1945 di Surabaya yang kemudian terkenal dengan hari pahlawan.

Demikianlah keprihatinan NU dalam membela kemerdekaan Republik Indonesia. Ini bukan berarti kemerdekaan Indonesia ini berkat perjuangan NU. Ia menyadari sepenuhnya bahwa kemerdekaan Republik Indonesia adalah hasil dari pada perjuangan seluruh rakyat Indonesia dengan sekuat tenaga dengan mencurahkan kemampuan sekuat tenaga. Namun sejarah takkan pernah melupakan bahwa dengan semangat keagamaan NU punya jasa yang sangat besar, NU ikut membela kemerdekaan Indonesia sehingga NU tidak tersisih secara keagamaan dengan semangat perjuangan bangsa.